

KOLABORASI KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM MENDORONG PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK 2024 DI KOTA BANJAR

Achmad Daryatno¹, Roufurohim²

STISIP Bina Putera Banjar, Banjar, Indonesia^{1,2}

E-mail: ahmaddaryatno5@gmail.com

ABSTRAK

Partisipasi masyarakat merupakan indikator krusial dalam keberhasilan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kolaborasi antara Komisi Pemilihan Umum dan Kesatuan Bangsa Politik Kota Banjar dalam upaya mendorong partisipasi warga pada Pilkada Serentak 2024. Metode penelitian yang diterapkan adalah kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan narasumber terpilih, studi dokumen, serta sumber-sumber pendukung lainnya. Penentuan informan menggunakan teknik Purposive Sampling, sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa kerjasama KPU dan Kesbangpol telah memenuhi semua indikator dalam teori kolaborasi. Kolaborasi ini diawali oleh kesadaran kedua pihak akan pentingnya meningkatkan partisipasi pemilih. Meskipun struktur kelembagaan yang dibangun bersifat non-formal, pembagian tugas antarlembaga berjalan dengan jelas. Pola kepemimpinan yang diterapkan mengedepankan transparansi dan komunikasi aktif, sementara proses kolaborasi diwujudkan melalui diskusi terbuka, peningkatan kepercayaan, kesepakatan bersama, dan pemahaman kolektif. Beberapa faktor yang mendukung keberhasilan kerja sama mencakup komunikasi efektif, dukungan tokoh lokal, dan keselarasan tujuan organisasi. Di sisi lain, kendala seperti anggaran terbatas, kurangnya pencatatan resmi, serta kesadaran politik masyarakat yang masih rendah turut memengaruhi proses.

Kata Kunci: Kolaborasi, Partisipasi, Pilkada

ABSTRACT

Community participation is a crucial indicator of the success of regional head elections. This study aims to examine the collaboration between the General Election Commission and Kesatuan Bangsa Politik of Banjar City in encouraging citizen participation in the 2024 Simultaneous Regional Elections. The research method applied is qualitative, with data collection through in-depth interviews with selected informants, document studies, and other supporting sources. Informants were selected using purposive sampling techniques, while data analysis used descriptive methods. The findings reveal that the cooperation

between the KPU and Kesbangpol has fulfilled all indicators in the theory of collaboration. This collaboration began with both parties' awareness of the importance of increasing voter participation. Although the institutional structure that was built was informal, the division of tasks between institutions was clear. The leadership style applied emphasizes transparency and active communication, while the collaboration process is realized through open discussions, increased trust, mutual agreements, and collective understanding. Factors supporting the success of the collaboration include effective communication, support from local leaders, and alignment of organizational goals. On the other hand, obstacles such as limited budgets, lack of official records, and low public political awareness also influenced the process.

Keywords: *Collaboration, Participation, Regional elections*

PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah fondasi utama dalam sistem demokrasi lokal. Selain menjadi sarana untuk melakukan peralihan kepemimpinan, Pilkada juga sering menjadi ajang persaingan politik yang rawan memicu ketegangan. Sebagai kota dengan dinamika sosial yang tinggi dan komposisi etnis yang beragam, Kota Banjar termasuk wilayah yang berisiko mengalami gesekan sosial, khususnya pada masa menjelang pelaksanaan Pilkada. (Yadisar, n.d.)

Pilkada Serentak 2024 di Kota Banjar menjadi momentum strategis untuk memperkuat partisipasi publik dalam proses politik. Namun, tantangan seperti rendahnya tingkat partisipasi, ketidakpedulian masyarakat, dan minimnya sosialisasi dapat menghambat terwujudnya pemilu yang inklusif dan berkualitas.

Abdullah (Sari et al., 2024) berpendapat bahwa setelah

menggunakan hak pilihnya dalam pemilu, masyarakat justru kehilangan kendali atas suara politik mereka karena hak tersebut beralih kepada partai politik. Alih-alih terwakili, hal ini sering berujung pada kekecewaan dan rasa tidak dipahami karena aspirasi mereka tidak lagi tersalurkan.

Berbagai permasalahan yang muncul dapat menghambat pelaksanaan pendidikan politik dan memengaruhi partisipasi generasi muda serta masyarakat secara umum. Akibatnya, mereka tidak lagi menjadi subjek politik, melainkan hanya dijadikan sebagai objek politik.

Melalui pendidikan politik, diharapkan kaum muda menjadi lebih peka terhadap signifikansi politik, sehingga mereka dapat bekerja sama dengan pemerintah dalam menciptakan keterlibatan yang proaktif. Dengan demikian, masyarakat akan lebih memahami hak dan kewajibannya memiliki kesadaran hukum, serta bersikap kritis, aktif, kreatif, dan konstruktif.

Sebagai ujung tombak stabilitas, Kesbangpol menjalankan peran strategis dengan memfasilitasi berbagai inisiatif. Upaya-upaya konkretnya meliputi penyelenggaraan pendidikan politik, pembinaan organisasi kemasyarakatan, pengadaan forum deteksi dini konflik, serta membangun sinergi dengan lembaga pemilu untuk menjaga kondusivitas sosial.

Pemerintah telah menetapkan aturan mengenai penyelenggaraan pendidikan politik melalui Peraturan Walikota Nomor 85 Tahun 2013 yang mengatur Tugas Utama dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Berdasarkan observasi lapangan, tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pilkada masih rendah, terutama pada Pilkada Serentak 2024 yang mengalami penurunan. Hal ini bertolak belakang dengan target

KPU Kota Banjar yang sebelumnya mencapai 80,6% partisipasi pemilih. Data rekapitulasi suara berbasis C1 Plano menunjukkan hanya sekitar 115 ribu pemilih dari 143 ribu DPT yang menggunakan hak pilihnya.

Untuk mengatasi hal ini, kolaborasi antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Banjar menjadi kunci dalam mendorong partisipasi aktif. Untuk mengatasi hal ini, kolaborasi antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Banjar menjadi kunci dalam mendorong partisipasi aktif.

Sinergi antara kedua lembaga ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman masyarakat akan pentingnya Pilkada, mengurangi golput, dan menciptakan iklim pemilu yang kondusif. Namun, efektivitas

kolaborasi ini perlu diteliti secara menyeluruh agar dapat memahami seberapa efektif mereka dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat di Kota Banjar.

KAJIAN PUSTAKA

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah salah satu fondasi penting demokrasi yang mencerminkan kedaulatan rakyat untuk menciptakan pemerintahan daerah yang demokratis. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung pada hakikatnya memperluas ruang bagi partisipasi

publik dalam tata kelola pemerintahan.

Hal ini dianggap sebagai wujud pengembalian hak penuh masyarakat di daerah untuk turut serta dalam pengambilan keputusan dan penentuan pilihan pemimpin mereka. (Sofian & Muhammad, n.d.)

Menurut Robert & Taehyon (dalam Subarsono, 2016) (Sampah et al., n.d.) *collaborative governance* adalah sebuah proses pengambilan keputusan

kolektif yang melibatkan berbagai pihak berkepentingan (stakeholder) yang memiliki kewenangan. Dalam proses ini, setiap pihak memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan usulan, yang kemudian diwujudkan dalam sebuah keputusan bersama.

Emerson, Nabatchi, & Balogh (Suwarna, 2023) yang menyatakan bahwa *collaborative governance* adalah sebuah kerangka kerja di mana berbagai pihak pemerintah, masyarakat, dan swasta bekerja sama melampaui batas-batas institusi mereka untuk merumuskan dan mengelola kebijakan publik demi mencapai tujuan bersama yang mustahil dicapai sendiri-sendiri.

Fokus utama penelitian ini menggunakan model kolaborasi dari Ansel dan Gash (2008) (Daniel Situmorang NPP et al., n.d.) yang sangat relevan untuk menganalisis kolaborasi antar-lembaga pemerintah.

Model kolaborasi Ansel dan Gash (Lintas et al., n.d.) dirancang khusus untuk menganalisis kolaborasi antar-organisasi dalam tata kelola pemerintahan. Model ini tidak melihat kolaborasi sebagai peristiwa tunggal, tetapi sebagai proses dinamis dan siklik yang dipengaruhi oleh sejumlah faktor kunci.

Adapun 4 indikator tersebut diantaranya: kondisi awal; desain

kelembagaan; kepemimpinan; dan proses kolaboratif.

1) Kondisi awal

Kondisi awal merujuk pada situasi sebelum kolaborasi dimulai, yang dapat berperan sebagai faktor pendukung atau penghambat bagi terbentuknya kerja sama. Terdapat tiga variabel kunci dalam kondisi awal:

- a. Ketimpangan, baik dalam hal kekuasaan, sumber daya, maupun pengetahuan.
- b. Sejarah hubungan, apakah di masa lalu lebih didominasi oleh kerja sama atau justru konflik.
- c. Faktor pendorong dan penghambat, yaitu alasan-alasan mengapa pihak-pihak tersebut bersedia atau enggan untuk berpartisipasi.

2) Desain kelembagaan dalam rencana ini membahas standar-standar kunci untuk kolaborasi. Aspek ini sangat krusial karena nantinya akan menjadi prosedur baku dalam seluruh siklus kerja sama. Yang digaris bawahi dalam rencana kelembagaan ini adalah bagaimana standar permainan dalam mengambil bagian dalam upaya yang terkoordinasi, bagaimana diskusi dibingkai, jenis aturan eksekusi yang jelas dan bagaimana ada keterusterangan selama waktu yang dihabiskan untuk menjalankan kerja sama.

3) Kepemimpinan

Peran pemimpin dalam kolaborasi tidak dapat diabaikan, terutama untuk mengantisipasi dan mencegah konflik yang berpotensi menghambat tujuan bersama. Di sisi lain, memulai proses kolaborasi sendiri seringkali menjadi tantangan awal. Dalam hal ini, model lima siklus kooperatif menawarkan fleksibilitas karena prosesnya dapat dimulai dari tahap mana pun.

- a. Pertukaran tatap muka
Semua administrasi didasarkan pada "pertukaran antar mitra". Pertukaran ini merupakan interaksi yang mengarah pada pengenalan kesepakatan/pemahaman. Wacana mitra ini biasanya diarahkan untuk membedakan pintu-pintu potensial yang terbuka dengan mengedepankan cerita bahwa akan ada "keuntungan bersama" bagi para mitra jika mereka dapat bekerja sama.
- b. Membangun kepercayaan
Membangun kepercayaan tidak dapat dibedakan dari interaksi wacana. Para perintis upaya terkoordinasi harus memiliki pilihan untuk membangun kepercayaan di

antara para mitra. Metode yang digunakan untuk membangun kepercayaan adalah proses yang panjang yang membutuhkan investasi dan membutuhkan tanggung jawab yang tinggi.

- c. Komitmen terhadap interaksi kerja sama
Adanya hubungan yang tinggi di antara para mitra mungkin akan membangun kewajiban untuk bekerja sama. Perlu digarisbawahi bahwa bekerja sama tentu saja bukan hanya sekali saja, tetapi merupakan sebuah proses yang terus menerus dan bermanfaat.
- d. Pemahaman Bersama
Pada titik tertentu para pemangku kepentingan harus mampu mengembangkan pemahaman Bersama tentang apa yang akan dicapai. Pemahaman Bersama ini dapat berupa adanya tujuan Bersama yang jelas, definisi masalah yang dihadapi Bersama juga sudah jelas dan pemahaman Bersama mengenai nilai yang akan dicapai dalam berkolaborasi
- e. Hasil sementara.
Cepat atau lambat, para mitra harus memiliki pilihan untuk menumbuhkan perspektif yang sama tentang apa yang dapat dicapai. Perspektif bersama ini dapat berupa adanya tujuan bersama yang masuk akal, makna yang jelas dari masalah yang dilihat oleh para mitra dan pemahaman tentang apa yang dapat dicapai.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, di mana fokus utamanya adalah untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai suatu fenomena dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data deskriptif seperti kata-kata, narasi, dan persepsi yang diberikan secara langsung oleh para partisipan (Ultavia et al., n.d.)

Untuk memperoleh data yang relevan, peneliti memilih informan secara *purposive sampling*, yaitu dengan menetapkan subjek berdasarkan tujuan-tujuan khusus yang telah ditetapkan dalam penelitian.

Pada penelitian ini, terdapat 8 orang informan diantaranya 2 komisioner KPU, sekretaris KPU, Kepala dinas Kesbangpol, pegawai kesbangpol dan 4 orang masyarakat.

Data dikumpulkan melalui beberapa metode, yaitu observasi, wawancara, studi dokumentasi, dan triangulasi. Observasi dilakukan untuk mengamati fenomena yang sedang diteliti secara langsung, sedangkan wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi dari informan melalui percakapan. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang sudah diolah sebelumnya, teknik triangulasi diterapkan untuk memperoleh data yang komprehensif dengan memadukan berbagai teknik

pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahap diantaranya reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Reduksi data dilakukan untuk mengorganisasi data yang diperoleh agar dapat diolah dan dianalisis lebih lanjut.

Proses analisis data meliputi dua langkah kunci:

1. Penyajian Data: Menyampaikan data dalam berbagai bentuk, misalnya uraian singkat, bagan, atau gambaran hubungan antar kategori.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Model *Collaborative Governance* yang menurut Ansell dan Gash (2008) menjadi pendekatan teoritis utama dalam menganalisis kerjasama antara KPU dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kota Banjar. Teori ini menekankan pentingnya proses pengambilan keputusan bersama antara aktor pemerintah dan non-pemerintah melalui dialog yang setara, partisipatif, dan kolaboratif. Terdapat 4 indikator dalam model ini, diantaranya: kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan, dan proses kolaboratif. Keempat indikator ini saling berkelindan dan menjadi kerangka untuk menilai efektivitas kerjasama yang dilakukan.

1. Kondisi Awal

Kondisi awal merupakan tahap awal dalam proses kolaborasi yang mencakup konteks sosial, politik, dan

administratif yang mendorong perlunya kerja sama antar lembaga. Dalam konteks penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kota Banjar, kondisi awal yang melatarbelakangi terjalannya kolaborasi antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) adalah adanya tantangan serius terkait tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum.

Kondisi awal merupakan elemen penting yang menjadi pemicu terbentuknya kolaborasi antara KPU Kota Banjar dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi, partisipasi pemilih pada Pilkada tahun 2018 tercatat hanya sebesar 80,6%, mengalami penurunan saat Pemilu 2024 sebesar 71,45%. Hal ini menjadi perhatian serius, mengingat partisipasi masyarakat merupakan indikator penting keberhasilan pemilu. KPU menyadari bahwa upaya peningkatan partisipasi membutuhkan kerja sama dengan instansi lain yang memiliki jaringan sosial-politik yang kuat, seperti Kesbangpol. Selain itu, tantangan seperti minimnya kesadaran politik warga, hoaks, dan apatisme politik juga menjadi dorongan kuat bagi terjadinya

kolaborasi. Dengan demikian, kondisi awal mencerminkan adanya kebutuhan bersama dan kesadaran akan keterbatasan masing-masing institusi.

Kondisi sosial masyarakat yang heterogen, dengan keberadaan komunitas pemuda, kelompok keagamaan, serta perbedaan akses informasi antara masyarakat kota dan desa, juga menjadi faktor pendorong perlunya kolaborasi lintas sektor. Dengan menyadari tantangan tersebut, KPU dan Kesbangpol Kota Banjar mulai membangun komunikasi intensif sejak awal tahun 2023 untuk menyusun strategi peningkatan partisipasi yang lebih inklusif dan berbasis komunitas.

Berdasarkan data dari KPU Kota Banjar, pada Pilkada tahun 2018 partisipasi pemilih hanya mencapai 80,6% atau kisaran 115 ribu pemilih dari total 143 ribuan pemilih terdaftar, yang berarti sekitar 28 ribu pemilih tidak menggunakan hak pilihnya. Pada Pilkada tahun 2024 partisipasi pemilih mengalami penurunan, pemilih hanya mencapai 71,5% atau kisaran 110 ribu pemilih dari total 154 ribuan pemilih terdaftar, yang berarti sekitar 44 ribu pemilih tidak menggunakan hak pilihnya. Pencapaian ini masih di bawah target yang telah ditetapkan sebesar 80%. Angka ini mengindikasikan adanya rendahnya kesadaran politik, minimnya pemahaman terkait pentingnya pemilihan kepala daerah, serta masih kuatnya sikap apatis masyarakat, terutama di kalangan pemilih pemula dan Masyarakat.

**TABEL DATA PARTISIPASI
PEMILIH PILKADA KOTA
BANJAR
TAHUN 2018 DAN 2024**

Tahun Pilkada	Jumlah DPT	Partisipasi Pemilih	Persentase
2018	143.516	115.806	80.6
2024	154.425	110.554	71.5 %

Sumber: KPU Kota Banjar 2025

Kondisi ini diperparah oleh masih terbatasnya jangkauan sosialisasi dari KPU secara mandiri. Dengan personel dan anggaran yang terbatas, KPU membutuhkan dukungan dari instansi yang memiliki jaringan sosial dan politik yang lebih luas. Di sinilah posisi Bakesbangpol Kota Banjar menjadi krusial. Sebagai lembaga yang memiliki hubungan intensif dengan tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, forum-forum keagamaan, dan lembaga pendidikan, Kesbangpol mampu menjadi jembatan strategis antara KPU dan masyarakat

2. Desain Kelembagaan

Evaluasi terhadap kegiatan ini dilakukan terhadap tiga aspek, yaitu proses pelaksanaan, produk yang dihasilkan, serta hasil penelitian. Temuan dari evaluasi ini kemudian akan dituangkan dalam kesimpulan.

Desain kelembagaan merupakan elemen penting dalam kerangka *Collaborative Governance*, karena menggambarkan struktur,

mekanisme, serta pembagian peran yang digunakan dalam proses kolaborasi antar lembaga. Dalam konteks kolaborasi antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjar dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), desain kelembagaan tidak diwujudkan dalam bentuk formal seperti perjanjian tertulis (MoU), tetapi terbentuk melalui pola kerja yang telah terbangun secara berulang, rutin, dan fungsional.

KPU Kota Banjar bertindak sebagai pemimpin teknis penyelenggara pemilu, sedangkan Bakesbangpol Kota Banjar berperan sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat, terutama dalam menjangkau ormas dan komunitas lokal. Dalam beberapa kegiatan, seperti pelatihan relawan demokrasi dan sosialisasi berbasis agama, keterlibatan Kesbangpol menjadi sangat vital karena mereka memiliki basis data dan hubungan sosial yang lebih luas dengan jaringan masyarakat sipil. Kolaborasi ini juga diperkuat dengan adanya dokumen kesepakatan informal yang menyatakan komitmen kedua belah pihak untuk saling mendukung dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik.

Dalam kolaborasi ini, desain kelembagaan tidak bersifat formal tetapi terstruktur secara fungsional. Tidak ditemukan dokumen resmi dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS), namun terdapat nota kesepahaman tidak tertulis dan pola kerja yang terbentuk

secara rutin. KPU menginisiasi berbagai kegiatan sosialisasi pemilih, sementara Kesbangpol menyediakan akses terhadap forum-forum masyarakat. Melalui forum tersebut, KPU dapat menyampaikan materi pemilu secara lebih luas. Di samping itu, Kesbangpol juga memfasilitasi keterlibatan organisasi pemuda dan tokoh adat dalam kegiatan sosialisasi. Ini menunjukkan bahwa meskipun tidak bersifat birokratis, desain kelembagaan mampu menunjang efektivitas program bersama.

3. Kepemimpinan

Dalam kerangka *Collaborative Governance*, kepemimpinan memegang peranan sentral sebagai penggerak dan penengah dalam proses kolaborasi antar lembaga. Menurut Ansell dan Gash (2008), keberhasilan kolaborasi sangat dipengaruhi oleh hadirnya pemimpin yang inklusif, mampu membangun kepercayaan, serta mendorong partisipasi aktif dari seluruh aktor yang terlibat.

Dalam konteks Kota Banjar, kepemimpinan dalam kolaborasi antara KPU dan Baesbangpol Kota Banjar lebih banyak ditentukan oleh gaya kepemimpinan individual dari para pejabat kunci di kedua lembaga tersebut. Berdasarkan wawancara dengan informan dari

KPU dan Bakesbangpol Kota Banjar yang dikemukakan sebelumnya, terungkap bahwa keberhasilan program sosialisasi dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pilkada Serentak 2024 sangat bergantung pada inisiatif pribadi dan komunikasi informal antara Ketua KPU, Sekretariat, dan Kepala Kesbangpol.

Peran kepemimpinan ditunjukkan melalui figur-figur kunci seperti Komisioner KPU dan Kepala Bakesbangpol yang aktif mendorong terciptanya ruang dialog yang terbuka, adil, dan solutif. Kepemimpinan dalam konteks ini tidak bersifat otoriter, melainkan partisipatif dan inklusif, dengan menekankan pada musyawarah untuk mufakat.

4. Proses Kolaboratif

Proses kolaboratif menggambarkan tahapan dan dinamika pelaksanaan kolaborasi, mulai dari perencanaan, implementasi, hingga evaluasi. Di Kota Banjar, proses ini dilakukan melalui serangkaian kegiatan bersama yang melibatkan berbagai aktor, mulai dari lembaga pemerintah, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, hingga media lokal. Dalam setiap tahapan, prinsip transparansi, komunikasi terbuka, dan kesetaraan menjadi pedoman utama.

Kegiatan kolaboratif yang dilakukan meliputi forum dialog demokrasi, sosialisasi di rumah ibadah, pelatihan relawan demokrasi, serta penyebaran informasi melalui media sosial dan radio lokal. Perencanaan

kegiatan dilakukan secara bersama dalam forum koordinasi, sementara pelaksanaan di lapangan dilakukan secara gotong royong dengan memanfaatkan sumber daya masing-masing pihak. Evaluasi dilakukan secara periodik melalui pertemuan teknis dan survei kepuasan masyarakat terhadap kegiatan sosialisasi.

Keterlibatan langsung masyarakat dalam proses ini menjadi kunci keberhasilan, Mereka tidak hanya berperan sebagai objek, melainkan juga sebagai subjek yang aktif berkontribusi.

Proses ini menunjukkan bahwa kolaborasi yang dibangun tidak bersifat simbolik, tetapi substantif dan berorientasi pada hasil yang konkret.

Faktor Pendukung dan Penghambat

Kerjasama antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjar dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pilkada Serentak 2024 dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersifat mendukung maupun menghambat. Secara umum, kerja sama ini berjalan cukup efektif berkat beberapa faktor kunci yang mendukung

terwujudnya kolaborasi yang harmonis. Namun demikian, tidak dapat diabaikan pula adanya kendala yang menjadi tantangan dalam implementasi di lapangan.

Dalam implementasi kerjasama antar lembaga, khususnya dalam kerangka *Collaborative Governance*, keberhasilan kolaborasi sangat ditentukan oleh faktor pendukung (*enabler*) yang memperkuat kerja sama dan faktor penghambat (*barrier*) yang dapat memperlambat atau mengganggu proses kolaboratif.

Kerjasama antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kesbangpol Kota Banjar dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pilkada Serentak 2024 memiliki beberapa faktor pendorong sekaligus tantangan yang dihadapi.

Faktor pendukung utama yang pertama adalah hubungan interpersonal yang kuat antara pimpinan dan staf kedua lembaga. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari KPU dan Bakesbangpol, komunikasi informal yang terbuka dan saling percaya membuat proses koordinasi berjalan lebih cepat dan efisien. Kerja sama tidak semata-mata bersifat formal, tetapi telah berkembang dalam bentuk kolaborasi lintas struktur yang bersifat responsif. Hal ini memudahkan pelaksanaan program sosialisasi yang melibatkan masyarakat, terutama dalam waktu-waktu yang mendesak menjelang hari pemungutan suara.

Kedua, adanya komitmen yang sama dalam mendorong peningkatan partisipasi pemilih juga menjadi faktor pendorong penting. KPU sebagai penyelenggara teknis memiliki tanggung jawab utama dalam menyampaikan informasi kepemiluan, sedangkan Bakesbangpol memiliki jangkauan luas terhadap berbagai unsur masyarakat melalui forum-forum strategis seperti FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama), Lembaga Pemantau Pemilu, serta jaringan organisasi kemasyarakatan. Kesamaan visi ini memperkuat sinergi program antara kedua lembaga.

Faktor pendukung ketiga adalah dukungan masyarakat dan tokoh lokal yang turut aktif terlibat dalam kegiatan sosialisasi. Para tokoh agama, tokoh adat, pemuda, dan perempuan menjadi agen informasi yang efektif dalam menjangkau kelompok-kelompok pemilih yang selama ini sulit dijangkau oleh lembaga formal. Hal ini menunjukkan bahwa kolaborasi tidak hanya terjadi antar institusi pemerintahan, tetapi juga melibatkan masyarakat sebagai bagian dari jaringan kolaboratif.

Di sisi lain, terdapat pula faktor penghambat yang cukup memengaruhi efektivitas kerja

sama. Salah satu yang paling dominan adalah keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, baik dari sisi KPU maupun Bakesbangpol. Sosialisasi secara masif membutuhkan biaya dan tenaga yang tidak sedikit, sementara alokasi anggaran sering kali tidak sebanding dengan kebutuhan di lapangan. Akibatnya, beberapa rencana program sosialisasi harus disesuaikan atau bahkan dibatalkan.

Selain itu, minimnya dokumentasi dan kelembagaan formal dalam mekanisme kerja sama juga menjadi kendala tersendiri. Walaupun komunikasi berjalan lancar secara informal, namun tidak semua bentuk kolaborasi terdokumentasi dengan baik dalam bentuk nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, atau berita acara. Hal ini menyebabkan kurangnya akuntabilitas dan evaluasi yang terstruktur terhadap kinerja kolaborasi tersebut.

Faktor penghambat lainnya adalah tingkat literasi politik masyarakat yang masih rendah, terutama di kalangan pemilih pemula dan warga di wilayah pinggiran. Meskipun sosialisasi telah dilakukan, namun tidak semua informasi dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat. Hal ini diperparah dengan masih maraknya informasi hoaks dan politik uang yang tersebar di masa menjelang pemilu.

KESIMPULAN

Kolaborasi Komisi Pemilihan Umum dan Kesatuan bangsa politik

merupakan *collaborative governance* yang efektif secara operasional namun rapuh secara kelembagaan. Keberhasilan dalam menjangkau masyarakat ditopang oleh hubungan personal dan modal sosial, namun kelemahan struktur formal berpotensi mengancam keberlanjutan kolaborasi pada pemilu mendatang. Model Ansell dan Gash terbukti relevan menganalisis dinamika kolaborasi, dengan menegaskan bahwa trust dan komunikasi informal dapat menjadi pengganti mekanisme formal dalam konteks pemerintah daerah dengan sumber daya terbatas

DAFTAR PUSTAKA

Daniel Situmorang NPP, A., Kota Pekanbaru, A., Raiu Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah, P., Skripsi, P., & Simangunsong, F. (n.d.). *COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU*.
Lintas, L., Angkutan, D., Di, J., Semarang Fawwaz, K., Tilano, A., & Suwitri, S. (n.d.). *COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM UPAYA KESELAMATAN*.
Sampah, P., Kota, D. I., Skripsi, P., Negara, A., Fakultas, P., Dan,

E., Sosial, I., Negeri, I., Syarif, S., & Riau, K. (n.d.). *COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM*.

Sari, F. E., Yuliani, F., & As' ari, H. (2024). *NNOVATIVE GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI* (Studi pada Penerapan Aplikasi dan Website Gigades. id). *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (JIHHP)*, 4(3).

Sofian, M., & Muhammad, F. (n.d.). *PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN PROSES DELIBERASI: MEWUJUDKAN KEBIJAKAN PUBLIK YANG PARTISIPATIF*.

Suwarna, R. (2023). Collaborative Governance dalam Menciptakan Branding Kota Surakarta Sebagai Kota Festival. *Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik*, 9(2), 160–184. <https://doi.org/10.26618/kjap.v9i2.10846>

Ultavia, A. B., Jannati, P., & Malahati, F. (n.d.). KUALITATIF : MEMAHAMI KARAKTERISTIK PENELITIAN SEBAGAI METODOLOGI. In *Jurnal Pendidikan Dasar* (Vol. 11, Issue 2).

Yadisar, A. M. (n.d.). *PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG PERWUJUDAN DARI KEHIDUPAN DEMOKRASI*